

**TELAH DIREVIU
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2024**

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2024 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2024 ini.

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto †

**REVIU SHEET
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

KOREKSI/SARAN/MASUKAN/PENJELASAN

Adanya revisi target dan anggaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang menyebabkan perubahan antara lain:

1. Kenaikan Pagu Anggaran.

Hal ini disebabkan karena perubahan presentase penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung RI dari 21 % menjadi 40 % sesuai dengan surat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2024 Tanggal 18 Januari 2024 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang semula 21 % sebesar Rp. 3.863.305.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) menjadi 40 % atau sebesar Rp. 7.816.746.000,- (Tujuh milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdapat kenaikan penggunaan dana PNBP sebesar Rp. 3.953.441.000,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Penambahan ini juga merubah pagu anggaran secara keseluruhan baik pusat maupun daerah semula sebesar Rp. 145.280.941.000 (Seratus empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 149.234.382.000,- (Seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PAGU AWAL		No	PAGU REVISI	
Pusat			Pusat		
1	Rupiah Murni	Rp. 56.813.061.000,-	1	Rupiah Murni	Rp. 56.813.061.000,-
2	PNBP	Rp. 3.863.305.000,-	2	PNBP	Rp. 7.816.746.000,-
Daerah			Daerah		
1	Rupiah Murni	Rp. 84.604.575.000,-	1	Rupiah Murni	Rp. 84.604.575.000,-

2	PNBP	-	2	PNBP	-
Total Pagu Pusat & Daerah		Rp. 145.280.941.000,-	Total Pagu Pusat & Daerah		Rp. 149.234.382.000,-

2. Perubahan Target Kinerja

A. Kenaikan target kinerja pada indikator jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang semula 565 unit menjadi 1.141 unit. hal tersebut disebabkan oleh:

- sesuai dengan surat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2024 Tanggal 18 Januari 2024 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kebutuhan satuan kerja atas alat pengolahan data meningkat, sehingga kenaikan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),seluruhnya dialokasikan ke pemenuhan sarana internal.

B. Kenaikan pada indikator jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang target semula 130.870 Perkara menjadi 131.404 Perkara.

Perubahan target sebagaimana disebut pada angka 1 dan 2 terlihat pada tabel berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Target	
			Semula	Menjadi
Terselenggaranya Dukungan Administrasi Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rupiah Murni	46 Unit	46 Unit
		PNBP	510 Unit	1.095 Unit
Total Target			565 Unit	1.141 Unit
Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Lingkungan Peradilan Umum.	Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Rupiah Murni	130.870 Perkara	131.404 Perkara
Total Target			130.870 Perkara	131.404 Perkara

C. Perubahan target kinerja prioritas nasional di lingkungan Peradilan Umum.

Perubahan target kinerja terdapat pada 3 (tiga) RO prioritas nasional dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat target pada posbakum satker yang terlalu tinggi, dimana target untuk posbakum adalah orang sementara pembayaran pada posbakum adalah berdasarkan

jam layanan (JL) sehingga target tidak tercapai. Masih terdapat satker yang MOU-nya dilaksanakan tidak pada awal tahun sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan secara tepat waktu.;

2. Dilakukan pengurangan target dan anggaran pada RO disebabkan masyarakat enggan memenuhi persyaratan yang menjadi ketentuan pada Perma 1 Tahun 2014. Perkara yang telah masuk dan dibiayai dengan anggaran pembebasan biaya perkara adalah perkara permohonan, sedangkan yang dialokasikan seluruhnya adalah untuk perkara gugatan sehingga anggaran tidak terealisasi secara maksimal;
3. Target perkara pada kegiatan sidang diluar gedung pengadilan terlalu tinggi sementara perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan tidak sesuai dengan target. Satuan target pada sidang diluar gedung pengadilan adalah perkara, sementara proses realisasi anggarannya berdasarkan kegiatan (perjalanan diñas) dan terdapat lokasi diluar gedung pengadilan pada satker yang lokasinya jauh sehingga membutuhkan tambahan alokasi anggaran.

Perubahan target kinerja sudah di sampaikan dalam memorandum nomor 163/DJU.1.01/RA1.7/XI/2024 tanggal 8 November 2024 hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Semula	Menjadi
Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739 Orang	44.491 Orang
	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara	784 Perkara
	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara	6.580 Perkara

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	131.404 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
		c. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan
2.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
3.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
4.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang
5.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
6.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang
		d. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 Laporan
		e. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang



Kegiatan	Anggaran
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah)	Rp. 84.604.575.000
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 2.971.635.000
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 53.344.426.000
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 5.579.126.000
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp. 2.734.620.000

Jakarta, 8 November 2024

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



**Perjanjian Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2024 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024.

Daftar Isi

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.....	3
Lampiran 1	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	7
Lampiran 2	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	9
Lampiran 3	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	11



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2024

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	131.404 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
		c. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan
2.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
3.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
4.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang
5.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
6.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat	1.141 Unit

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
		Jenderal Badan Peradilan Umum	
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang
		d. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 Laporan
		e. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

Kegiatan	Anggaran
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah)	Rp. 84.604.575.000
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 2.971.635.000
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 53.344.426.000
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 5.579.126.000
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp. 2.734.620.000

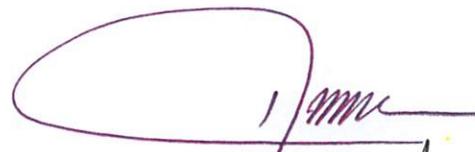
Jakarta, 8 November 2024

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Arry Soelaksono

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit

Kegiatan	Anggaran	
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	Rp	53.344.426.000
6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	41.100.280.000
6243.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	8.151.346.000
6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	1.109.696.000
6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	2.983.104.000

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Kurnia Arry Soelaksonoo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum



Hasanudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	10%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
2.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang
3.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang

Kegiatan	Anggaran	
	Rp.	
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	2.971.635.000
1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp.	2.971.635.000
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	5.579.126.000
6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	1.219.949.000
6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	4.304.947.000
6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp.	54.230.000

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



[Handwritten signature]
Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum



Hasanudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum

Zahlisa Vitalita

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
2.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
3.	Teselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (ekskusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
4.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

Kegiatan	Anggaran	
	Rp	
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah)	Rp	84.604.575.000
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	5.429.589.000
1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi	Rp.	222.075.000
1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	57.032.156.000
1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	13.134.500.000
1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	8.786.255.000
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	2.734.620.000
6630.ABD. Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rp.	368.130.000
6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	1.283.817.000
6630.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp	1.082.673.000

Jakarta, 8 November 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum



Zahlisa Vitalita